

KRITIK TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI STRATEGI KEKUASAAN: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Lilik Pujiati¹, Nur Fadrijh², Wahidahwati³, Nur Anisah⁴

Institut Teknologi Dan Bisnis PGRI Dewantara Jombang dan Stiesia Surabaya.

Korespondensi*: lilik_pujiati@itebisdewantara.ac.id, nurfadrijh@stiesia.ac.id, wahidahwati@stiesia.ac.id, nur_anisah@itebisdewantara.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai strategi kekuasaan dalam kapitalisme kontemporer melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Studi ini mengkaji 45 artikel jurnal bereputasi internasional yang diterbitkan dalam rentang 2000–2024 dengan fokus pada perspektif kritis (Neo-Marxian, Gramscian, *political economy*, dan *critical accounting*). Hasil kajian menunjukkan bahwa CSR tidak semata-mata merupakan manifestasi tanggung jawab moral korporasi, melainkan berfungsi sebagai instrumen legitimasi, reproduksi hegemoni, dan stabilisasi kapitalisme. Rasionalitas moral korporasi cenderung bersifat instrumental dan strategis, bukan etis-transformatif. Artikel ini berkontribusi dengan menyusun kerangka konseptual integratif yang menjelaskan bagaimana CSR beroperasi sebagai mekanisme kekuasaan melalui legitimasi simbolik, kooptasi pemangku kepentingan, dan normalisasi ketimpangan struktural.

Kata kunci: CSR, Hegemoni, *Political Economy*, *Critical Accounting*.

Abstract

This article aims to analyze *Corporate Social Responsibility* (CSR) as a power strategy in contemporary capitalism through a *Systematic Literature Review* (SLR) approach. This study examines 45 articles from internationally reputable journals published between 2000 and 2024, focusing on critical perspectives (Neo-Marxian, Gramscian, *Political Economy*, and *Critical Accounting*). The results show that CSR is not merely a manifestation of corporate moral responsibility but rather functions as an instrument of legitimacy, reproduction of hegemony, and stabilization of capitalism. Corporate moral rationality tends to be instrumental and strategic, rather than ethical-transformative. This article contributes by developing an integrative conceptual framework that explains how CSR operates as a mechanism of power through symbolic legitimacy, stakeholder co-optation, and the normalization of structural inequality.

Keywords: CSR, Hegemony, *Political Economy*, *Critical Accounting*.

A. PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, *Corporate Social Responsibility* (CSR) mengalami institusionalisasi global melalui berbagai standar seperti *Global Reporting Initiative* (GRI), *United Nations Global Compact* (UNGC), dan *International Organization for Standardization* (ISO 26000). CSR diposisikan sebagai komitmen moral korporasi terhadap pembangunan berkelanjutan. Dalam diskursus arus utama, CSR diposisikan sebagai evolusi moral kapitalisme. Korporasi tidak lagi hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan lingkungan, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan. Narasi ini diperkuat oleh konsep ESG (*Environmental, Social, Governance*) dan *sustainable finance*.

Namun, kritik tidak lepas dari program CSR tersebut. Terdapat fenomena yang berlawanan dengan gema CSR sebagai praktik moral atau etis. Kenyataannya masih banyak

pelaksanaan CSR yang tidak selaras dengan bingkai etis. Kasus praktik CSR yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia di Papua menjadi sorotan penting bagi kritik ekonomi politik terhadap CSR. Freeport dikenal dengan program CSR berupa pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat lokal di sekitar area operasi tambang Grasberg. Meski begitu, isu lingkungan seperti tuduhan pencemaran limbah tailing dan degradasi ekosistem akibat operasi tambang terus bergulir di publik serta menarik kritik dari masyarakat dan akademisi. Laporan media dan tulisan kritis menyebut bahwa limbah tambang telah mencemari sungai, menghambat produktivitas pertanian, dan menurunkan kualitas hidup masyarakat adat setempat, sehingga CSR dianggap belum efektif mengatasi dampak sosial–ekologis yang lebih besar akibat kegiatan tambang. Kritik ini menunjukkan adanya kontradiksi antara citra moral CSR dan realitas dampak operasional perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar (Kompasiana).

Contoh lain dari kritik atas rasionalitas moral korporasi dalam kapitalisme global terlihat pada tuntutan hukum terhadap Shell yang menghadapi gugatan komunitas di Delta Niger, Nigeria atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tumpahan minyak selama bertahun–tahun. Perjuangan komunitas Ogale dan Bille yang membawa kasus ini ke pengadilan tinggi di London menyoroti bagaimana operasi perusahaan minyak besar telah menghancurkan mata pencaharian masyarakat, mencemari sumber air, dan merusak habitat lokal. Kritik terhadap Shell menunjukkan bahwa tuntutan CSR sering berlawanan dengan praktik operasional yang tetap mengabaikan dampak ekologis, dan bahwa “tanggung jawab sosial” kerap menjadi strategi reputasi untuk meredam tekanan hukum dan publik (Reuters).

Selain itu, praktik CSR dalam ranah keberlanjutan lingkungan juga kerap mendapat kritik. Misalnya, perusahaan multinasional seperti Unilever berlomba mempromosikan komitmen terhadap keberlanjutan dan praktik sourcing yang berkelanjutan, termasuk dalam industri kelapa sawit yang sering dikaitkan dengan deforestasi dan konflik lahan. Meskipun Unilever mengklaim penggunaan sumber minyak sawit yang berkelanjutan dan keterlibatan dalam inisiatif multi–pihak untuk meningkatkan transparansi rantai pasok, kritik dari kelompok lingkungan dan konsumen mempertanyakan sejauh mana komitmen tersebut benar-benar mengubah pola produksi yang lebih luas, atau justru menjadi alat pemasaran untuk memperkuat legitimasi moral perusahaan tanpa merombak struktur kapital yang mendasari eksternalitas lingkungan. (Friends of the Earth).

Dari berbagai kasus tersebut terlihat bahwa CSR yang dilakukan oleh perusahaan tidak semata-mata merupakan praktik sosial yang merupakan perwujudan moral dari Perusahaan terhadap Masyarakat dan lingkungan, namun CSR telah bertransformasi dalam kapitalisme. Hal tersebut menunjukkan pergeseran peran negara dan ruang publik, di mana perusahaan multinasional hadir sebagai aktor quasi-negara melalui program sosialnya. Literatur *critical accounting* dan *political economy* menawarkan perspektif alternatif. CSR dipahami bukan sebagai manifestasi moralitas korporasi, melainkan sebagai mekanisme legitimasi dan reproduksi kekuasaan dalam kapitalisme kontemporer. Pertanyaan utama penelitian ini adalah “Bagaimana CSR beroperasi sebagai strategi kekuasaan dalam kapitalisme, dan bagaimana rasionalitas moral korporasi dikonstruksi secara instrumental?”

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. CSR Dalam Arus Utama

Corporate Social Responsibility (CSR) telah menjadi salah satu konsep sentral dalam literatur manajemen, akuntansi, dan tata kelola perusahaan modern. Secara konseptual, CSR merujuk pada komitmen perusahaan untuk beroperasi secara etis, berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup karyawan, komunitas lokal, dan masyarakat luas. Definisi klasik yang sering dirujuk berasal dari Howard R. Bowen yang dalam karyanya *Social Responsibilities of the Businessman* (1953) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial pebisnis adalah kewajiban untuk mengejar kebijakan dan keputusan yang sejalan dengan nilai-nilai masyarakat. Pemikiran Bowen ini menjadi fondasi awal berkembangnya diskursus CSR dalam literatur akademik.

Perkembangan konseptual CSR semakin sistematis melalui kontribusi Archie B. Carroll yang mengemukakan model piramida CSR, terdiri atas tanggung jawab ekonomi, legal, etis, dan filantropis. Model ini menekankan bahwa tanggung jawab ekonomi dan legal merupakan fondasi utama, sementara tanggung jawab etis dan filantropis memperluas dimensi moral korporasi. Kerangka ini memperlihatkan bahwa CSR tidak sekadar aktivitas amal, tetapi bagian integral dari strategi bisnis. Namun, kritik terhadap pendekatan ini muncul dari perspektif ekonomi klasik seperti yang dikemukakan oleh Milton Friedman, yang dalam artikelnya di *The New York Times Magazine* (1970) menyatakan bahwa satu-satunya tanggung jawab sosial bisnis adalah meningkatkan keuntungan selama tetap mematuhi aturan hukum. Pandangan ini menegaskan dikotomi antara orientasi pemegang saham (*shareholder theory*) dan orientasi pemangku kepentingan (*stakeholder theory*).

Teori pemangku kepentingan yang dipopulerkan oleh R. Edward Freeman menempatkan CSR dalam kerangka relasi antara perusahaan dan berbagai kelompok yang terdampak oleh aktivitasnya. Dalam perspektif ini, keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari profitabilitas, tetapi juga dari kemampuannya memenuhi ekspektasi stakeholder seperti karyawan, konsumen, komunitas, dan pemerintah. Teori ini menjadi dasar normatif sekaligus instrumental bagi implementasi CSR dalam praktik tata kelola perusahaan modern. Sejalan dengan itu, teori legitimasi (*legitimacy theory*) memandang CSR sebagai sarana perusahaan untuk memperoleh dan mempertahankan legitimasi sosial melalui pengungkapan informasi sosial dan lingkungan.

Dalam perkembangan mutakhir, CSR semakin terintegrasi dengan konsep keberlanjutan (*sustainability*) dan triple bottom line yang diperkenalkan oleh John Elkington, yang menekankan keseimbangan antara profit (ekonomi), *people* (sosial), dan planet (lingkungan). Konsep ini mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang aktivitasnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Integrasi ini juga tercermin dalam praktik pelaporan keberlanjutan yang banyak mengacu pada standar yang dikembangkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI), yang menyediakan pedoman pengungkapan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan secara transparan dan terukur.

Dalam konteks akuntansi dan tata kelola perusahaan, CSR juga dikaitkan dengan praktik pengungkapan (*disclosure*) dan akuntabilitas. Studi empiris menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat pengungkapan CSR yang tinggi cenderung memiliki reputasi yang lebih baik, risiko yang lebih rendah, serta akses pendanaan yang lebih luas. Namun demikian, literatur kritis menyoroti potensi terjadinya “*greenwashing*”, yaitu praktik manipulatif di mana perusahaan menggunakan narasi CSR untuk membangun citra positif

tanpa perubahan substantif dalam praktik operasionalnya. Perspektif kritis ini banyak dipengaruhi oleh teori institusional dan pendekatan ekonomi politik yang melihat CSR sebagai instrumen legitimasi dalam sistem kapitalisme global.

Dalam konteks negara berkembang, termasuk Indonesia, implementasi CSR sering kali didorong oleh regulasi. Di Indonesia, kewajiban CSR bagi perusahaan tertentu diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, khususnya bagi perusahaan yang bergerak di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam. Regulasi ini memperlihatkan pergeseran CSR dari aktivitas sukarela menjadi kewajiban hukum (mandatory CSR). Perubahan ini memunculkan diskursus mengenai efektivitas, orientasi, dan dampak nyata CSR terhadap pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

2. Teori Hegemoni

Teori hegemoni dikembangkan oleh Antonio Gramsci sebagai kritik terhadap determinisme ekonomi dalam Marxisme klasik. Dalam karya monumentalnya, *Prison Notebooks* (ditulis antara 1929–1935), Gramsci menjelaskan bahwa dominasi kelas dalam masyarakat kapitalis tidak semata-mata dipertahankan melalui kekerasan atau kontrol koersif negara, melainkan terutama melalui kepemimpinan moral dan intelektual yang menghasilkan persetujuan (consent) dari kelompok yang didominasi (Gramsci, 1971).

Konsep hegemoni ini menekankan bahwa kelas penguasa mempertahankan kekuasaan dengan membangun sistem nilai, norma, dan keyakinan yang diterima sebagai “wajar” dan “alamiah” oleh masyarakat luas. Gramsci membedakan antara *political society* dan *civil society*. *Political society* merujuk pada institusi koersif seperti negara, hukum, dan aparat keamanan, sedangkan *civil society* mencakup institusi-institusi sosial seperti pendidikan, agama, media, dan organisasi kemasyarakatan. Dalam konteks ini, hegemoni bekerja terutama melalui ranah *civil society*, di mana ideologi dominan diproduksi dan direproduksi secara terus-menerus. Dengan demikian, dominasi kapitalisme tidak hanya berlangsung melalui kontrol ekonomi, tetapi juga melalui produksi makna dan kesadaran sosial yang membentuk cara masyarakat memahami realitas (Gramsci, 1971).

Konsep penting lainnya dalam teori hegemoni adalah peran *organic intellectuals*, yaitu intelektual yang muncul dari dan mewakili kepentingan kelas tertentu. Menurut Gramsci, setiap kelas sosial yang ingin mempertahankan atau merebut kekuasaan harus mampu membangun blok historis (*historic bloc*), yaitu aliansi sosial-politik yang menyatukan kepentingan ekonomi, politik, dan budaya dalam satu kerangka ideologis yang koheren. Hegemoni, dengan demikian, bukanlah kondisi statis, melainkan proses dinamis yang selalu dinegosiasikan dan dipertahankan melalui perjuangan ideologis.

3. Teori Ekonomi Politik Kritis

Teori ekonomi politik kritis dalam perspektif *Neo-Marxian* berangkat dari kritik terhadap kapitalisme sebagai sistem yang tidak netral, melainkan sarat dengan relasi kekuasaan dan kepentingan kelas. Berbeda dengan pendekatan ekonomi neoklasik yang menekankan efisiensi pasar dan rasionalitas individual, perspektif *Neo-Marxian* melihat struktur ekonomi sebagai arena dominasi yang membentuk institusi sosial, politik, dan budaya. Pemikiran ini berakar pada karya Karl Marx yang menempatkan relasi produksi dan kepemilikan alat produksi sebagai dasar pembentukan struktur kelas dalam masyarakat kapitalis. Dalam kerangka ini, akumulasi kapital menjadi tujuan utama sistem, sementara relasi kerja dan distribusi nilai surplus mencerminkan ketimpangan struktural antara kelas kapitalis dan kelas pekerja (Marx, 1867/1976).

Dalam perkembangan selanjutnya, perspektif *Neo-Marxian* memperluas analisis Marx dengan menekankan dimensi ideologis dan institusional kapitalisme. Antonio Gramsci memperkenalkan konsep hegemoni untuk menjelaskan bagaimana dominasi kelas dipertahankan melalui persetujuan sosial dan kepemimpinan moral-intelektual, bukan semata-mata melalui paksaan (Gramsci, 1971). Sementara itu, Louis Althusser menyoroti peran aparatus ideologis negara (*ideological state apparatuses*) seperti pendidikan, media, dan agama dalam mereproduksi relasi produksi kapitalis (Althusser, 1971). Perspektif ini menegaskan bahwa ekonomi politik tidak dapat dipisahkan dari praktik-praktik diskursif dan institusional yang menopang keberlangsungan sistem kapitalisme.

Dalam konteks organisasi dan akuntansi, pendekatan ekonomi politik kritis berkembang melalui kontribusi para sarjana seperti James O'Connor dan Jürgen Habermas yang menekankan krisis legitimasi dalam negara kapitalis lanjut (O'Connor, 1973; Habermas, 1976). O'Connor mengemukakan tesis “krisis fiskal negara” yang menunjukkan kontradiksi antara fungsi akumulasi kapital dan fungsi legitimasi sosial negara. Dalam konteks korporasi, perspektif ini kemudian diadopsi dalam studi akuntansi kritis oleh Gray, Tinker, dan Cooper yang melihat praktik pelaporan sosial dan lingkungan sebagai bagian dari proses legitimasi dan reproduksi kapitalisme (Gray et al., 1995; Tinker, 1980). Dengan demikian, CSR dan pelaporan keberlanjutan tidak dipahami sebagai ekspresi moral murni, melainkan sebagai respons strategis terhadap tekanan sosial guna mempertahankan stabilitas sistem.

4. Teori Rasionalitas Instrumental

Teori rasionalitas instrumental berakar pada tradisi teori sosial kritis yang menyoroti dominasi logika efisiensi dan kalkulasi dalam masyarakat modern. Konsep ini awalnya berkembang dari pemikiran Max Weber tentang rasionalitas formal (*Zweckrationalität*), yaitu tindakan yang diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu melalui perhitungan paling efisien atas sarana yang tersedia (Weber, 1978). Dalam kerangka Weber, modernitas ditandai oleh proses rasionalisasi yang meluas ke dalam birokrasi, hukum, dan ekonomi kapitalis. Rasionalitas instrumental menempatkan efisiensi, prediktabilitas, dan kontrol sebagai prinsip utama, sering kali mengesampingkan pertimbangan nilai substantif atau moralitas.

Konsep ini kemudian dikritisi secara mendalam oleh para pemikir Mazhab Frankfurt seperti Max Horkheimer dan Theodor W. Adorno dalam *Dialectic of Enlightenment* (1944/2002). Mereka berargumen bahwa rasionalitas instrumental telah mereduksi akal budi menjadi alat dominasi, di mana rasio tidak lagi berfungsi untuk emansipasi manusia, melainkan untuk mengontrol alam dan sesama manusia demi kepentingan sistem kapitalis. Dalam konteks ini, rasionalitas berubah menjadi alat teknokratis yang mengutamakan kalkulasi dan produktivitas, sekaligus mengabaikan dimensi etis dan reflektif kehidupan sosial.

Pengembangan lebih lanjut dilakukan oleh Jürgen Habermas yang membedakan antara rasionalitas instrumental (atau rasionalitas sistem) dan rasionalitas komunikatif (Habermas, 1984). Rasionalitas instrumental berorientasi pada keberhasilan (*success-oriented action*), sedangkan rasionalitas komunikatif berorientasi pada pemahaman bersama (*mutual understanding*). Habermas mengkritik kolonisasi dunia kehidupan (*lifeworld*) oleh sistem ekonomi dan birokrasi yang didominasi oleh logika instrumental. Ketika rasionalitas instrumental mendominasi ruang sosial, proses deliberasi etis dan partisipasi demokratis cenderung terpinggirkan.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode SLR atau *Systematic Literature Review*. Metode SLR adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi temuan penelitian sebelumnya serta menafsirkan temuan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan SLR berbasis protokol PRISMA dengan tahapan:

1. Identifikasi artikel melalui database Scopus, Web of Science, dan ScienceDirect.
2. Penyaringan berdasarkan kata kunci: *CSR, power, hegemony, capitalism, Critical accounting, Political Economy*.
3. Seleksi artikel peer-reviewed berbahasa Inggris.
4. Analisis tematik dan sintesis konseptual.

Pada tahap Inclusion and Exclusion Criteria, kriteria data yang dikumpulkan akan diperiksa untuk menentukan apakah paper tersebut layak digunakan untuk peninjauan. Paper dapat dianggap layak sebagai sumber penelitian berdasarkan kriteria sebagai berikut: Artikel 2000–2024:

1. Jurnal bereputasi Q1–Q2
2. Menggunakan perspektif kritis (*Neo-Marxian, Gramscian, critical theory*)
3. Fokus pada dimensi kekuasaan dan legitimasi.

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Search Process dan Inclusion and Exclusion Criteria

Untuk memudahkan identifikasi paper yang diperoleh melalui proses pencarian, hasil search process yang ditampilkan dalam tabel 1 telah dikelompokkan berdasarkan jurnal, perspektif teori, metode, temuan utama, dan relevansi terhadap tema kekuasaan.

Tabel 1. Pengelompokan Jurnal

No	Penulis & Tahun	Jurnal	Perspektif Teori	Metode	Fokus Analisis	Temuan Utama	Relevansi terhadap Tema Kekuasaan
1	Banerjee (2008)	Critical Sociology	Neo-Marxian	Konseptual	Kritik CSR global	CSR memperkuat kapitalisme global	CSR sebagai legitimasi kapital
2	Levy & Egan (2003)	Journal of Management Studies	Neo-Gramscian	Studi kasus	Strategi politik korporasi	Korporasi membangun hegemoni melalui CSR	CSR sebagai produksi consent
3	Gray (2010)	Accounting, Organizations and Society	<i>Critical Accounting</i>	Konseptual	Sustainability accounting	CSR gagal mengubah struktur produksi	CSR simbolik
4	Spence (2009)	Critical Perspectives on Accounting	Critical theory	Konseptual	Emansipasi akuntansi sosial	Potensi emansipasi dibatasi struktur kapital	Kooptasi kritik

No	Penulis & Tahun	Jurnal	Perspektif Teori	Metode	Fokus Analisis	Temuan Utama	Relevansi terhadap Tema Kekuasaan
5	Cho et al. (2015)	Accounting, Organizations and Society	Legitimacy theory (kritis)	Analisis konten	Impression management	Laporan CSR bersifat strategis	Legitimasi simbolik
6	Fleming & Jones (2013)	Organization	Political Economy	Konseptual	CSR dan neoliberalism	CSR sebagai ideologi korporasi	Depolitisasi konflik
7	Blowfield & Frynas (2005)	International Affairs	Development critique	Review	CSR di Global South	CSR tidak menyentuh akar kemiskinan	Reproduksi ketimpangan
8	Scherer & Palazzo (2011)	Journal of Management Studies	Habermasian	Konseptual	Political CSR	CSR sebagai governance global	Normalisasi kekuasaan privat
9	Roberts (2003)	Accounting, Organizations and Society	Foucaultian	Teoretis	Accountability	CSR membangun subjek moral	Teknologi kontrol
10	O'Dwyer (2003)	Accounting, Auditing & Accountability Journal	Critical	Studi kualitatif	NGO dan CSR	Dialog terbatas & manajerial	Kooptasi stakeholder
11	Tinker et al. (1991)	Accounting, Organizations and Society	Marxian	Teoretis	Akuntansi & ideologi	Akuntansi sebagai alat dominasi	CSR sebagai ekstensi ideologis
12	Cooper & Owen (2007)	Accounting, Organizations and Society	Critical	Analisis regulasi	Accountability publik	Partisipasi publik semu	Demokrasi terbatas
13	Neu et al. (1998)	Accounting, Organizations and Society	Political Economy	Analisis wacana	Environmental reporting	Narasi lingkungan selektif	Framing kekuasaan
14	Milne & Gray (2013)	Journal of Business Ethics	Sustainability critique	Konseptual	Triple bottom line	Konsep keberlanjutan dilemahkan	Greenwashing struktural
15	Bebbington et al. (2008)	Accounting, Auditing & Accountability Journal	Critical sustainability	Review	Reporting dan perubahan sosial	CSR lebih simbolik daripada substantif	Stabilisasi sistem

Sumber: Artikel Ilmiah

2. Klasifikasi Tematik Hasil SLR

Berikut adalah hasil klasifikasi tema dari artikel yang telah di seleksi.

Tabel 4.2 Klasifikasi Tema

Tema Besar	Jumlah Artikel	Karakteristik
CSR sebagai Legitimasi	18	Fokus pada impression management
CSR dan Hegemoni	11	Pendekatan Gramscian
CSR dan Ideologi Kapital	9	Perspektif Neo-Marxian

Tema Besar	Jumlah Artikel	Karakteristik
CSR dan Kooptasi Stakeholder	8	NGO, partisipasi publik
CSR dan Greenwashing	6	Sustainability simbolik

Sumber: Data Peneliti

Mayoritas literatur menunjukkan bahwa CSR digunakan untuk mengelola persepsi publik, mengurangi tekanan regulatif, meningkatkan reputasi pasar.

3. Pembahasan

Corporate Social Responsibility (CSR) dalam literatur arus utama umumnya dipahami sebagai perluasan tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan (Freeman, 1984). Dalam pendekatan normatif, CSR dipandang sebagai kewajiban etis untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan kepentingan sosial dan lingkungan (Carroll, 1991). Namun, dalam perspektif ekonomi politik kritis, CSR tidak dapat dilepaskan dari struktur kapitalisme global yang menjadi konteks kelahirannya (Banerjee, 2008).

Banerjee (2008) berargumen bahwa CSR sering kali berfungsi sebagai mekanisme tata kelola privat (*private governance*) yang memperkuat kekuasaan korporasi dalam ruang publik. Alih-alih menjadi transformasi moral yang radikal, CSR berkembang sebagai respons terhadap krisis legitimasi kapitalisme dan tekanan masyarakat sipil. Blowfield dan Frynas (2005) juga menunjukkan bahwa CSR dalam praktiknya sering mencerminkan kepentingan perusahaan dan negara maju, bukan kebutuhan struktural masyarakat lokal di negara berkembang. Dengan demikian, CSR bukan fenomena netral, melainkan praktik sosial yang tertanam dalam relasi produksi dan distribusi kekuasaan global.

Konsep rasionalitas menjadi kunci dalam mengkritisi moralitas korporasi. Habermas (1984) membedakan antara rasionalitas komunikatif dan rasionalitas instrumental. Rasionalitas komunikatif berorientasi pada dialog etis dan pencapaian pemahaman bersama, sedangkan rasionalitas instrumental berorientasi pada efektivitas pencapaian tujuan strategis. Dalam konteks kapitalisme kontemporer, CSR lebih sering mencerminkan rasionalitas instrumental. Perusahaan mengadopsi CSR sebagai strategi manajemen risiko, reputasi, dan keberlanjutan pasar (Porter & Kramer, 2006). Bahkan konsep "*Creating Shared Value*" yang dikemukakan Porter dan Kramer (2011) tetap menempatkan nilai sosial dalam kerangka peningkatan daya saing perusahaan. Habermas (1987) memperingatkan tentang kolonisasi dunia kehidupan (*lifeworld*) oleh sistem ekonomi. CSR dalam banyak kasus dapat dipahami sebagai bentuk kolonisasi tersebut, di mana ruang moral dan sosial direduksi menjadi instrumen strategis untuk mempertahankan legitimasi pasar.

Mengacu pada teori hegemoni Gramsci (1971), dominasi dalam kapitalisme modern dibangun melalui kombinasi coercion dan consent. Korporasi tidak hanya mempertahankan kekuasaan melalui kekuatan ekonomi, tetapi juga melalui pembentukan konsensus sosial. Dalam konteks ini, CSR berfungsi sebagai alat produksi *consent*. Program sosial dan lingkungan membentuk citra moral korporasi dan menciptakan legitimasi sosial (Suchman, 1995). Cho, Roberts, dan Patten (2010) menunjukkan bahwa pelaporan sosial dan lingkungan sering digunakan sebagai strategi legitimasi untuk merespons tekanan eksternal. CSR menjadi mekanisme hegemonik ketika ia menormalkan keberadaan korporasi sebagai aktor pembangunan, sekaligus meredam kritik terhadap struktur produksi yang eksploitatif. Dengan demikian, hegemoni bekerja melalui representasi moral, bukan sekadar dominasi ekonomi.

Fleming dan Jones (2013) berargumen bahwa CSR sering kali mendepolitisasi konflik struktural dengan mengubahnya menjadi persoalan manajerial. Isu ketimpangan dan kerusakan ekologis diposisikan sebagai tantangan teknis yang dapat diselesaikan melalui indikator keberlanjutan dan standar pelaporan. Dalam kerangka *Critical accounting*, Gray, Owen, dan Adams (1996) menegaskan bahwa pelaporan sosial bukan sekadar alat transparansi, melainkan praktik diskursif yang membentuk realitas sosial. Akuntansi keberlanjutan menentukan apa yang dianggap relevan dan terukur, sekaligus mengecualikan dimensi yang sulit dikalkulasi seperti keadilan distributif atau relasi kuasa. Akibatnya, konflik struktural dipindahkan dari arena politik ke arena administratif. Pertanyaan tentang keadilan sosial berubah menjadi evaluasi performa berbasis metrik ESG.

Dalam perspektif *Marxian*, kapitalisme didorong oleh logika akumulasi tanpa batas (Marx, 1867/1976). Ketimpangan dan krisis ekologis bukan anomali, melainkan konsekuensi inheren dari sistem tersebut. CSR muncul sebagai mekanisme koreksi parsial terhadap eksternalitas kapitalisme. Namun, seperti ditegaskan Banerjee (2008), CSR tidak mengubah struktur kepemilikan atau distribusi surplus. Ia hanya mengalokasikan sebagian kecil keuntungan untuk menjaga stabilitas sosial. Dengan demikian, CSR berfungsi sebagai “legitimizing ideology” yang memperpanjang umur kapitalisme dengan memberikan wajah humanis pada proses akumulasi (Fleming & Jones, 2013).

Critical accounting theory memandang akuntansi sebagai praktik sosial dan politik (Chua, 1986). Laporan keberlanjutan bukan sekadar cerminan realitas, melainkan alat konstruksi realitas. Cho et al. (2015) menunjukkan bahwa pengungkapan CSR sering kali bersifat simbolik (*symbolic legitimation*), terutama ketika tidak diiringi perubahan substantif dalam praktik operasional. Pelaporan berfungsi menciptakan persepsi transparansi dan tanggung jawab, meskipun struktur produksi tetap sama. Dalam konteks ini, moralitas korporasi diproduksi melalui bahasa, indikator, dan narasi yang terstandarisasi. CSR menjadi arena di mana kapitalisme merepresentasikan dirinya sebagai sistem yang etis dan berkelanjutan.

E. PENUTUP

Simpulan

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa CSR dalam kapitalisme kontemporer beroperasi sebagai mekanisme legitimasi, produksi konsensus, dan depolitisasi konflik struktural. Rasionalitas moral korporasi lebih dominan bersifat instrumental daripada komunikatif. Moralitas menjadi bagian dari strategi akumulasi kapital, bukan koreksi radikal terhadapnya. CSR memang menghasilkan manfaat sosial tertentu, tetapi manfaat tersebut sering bersifat parsial dan tidak mengubah struktur ketimpangan.

Temuan ini memperkuat argumen bahwa CSR merupakan bagian dari infrastruktur ideologis kapitalisme. CSR tidak netral secara politik; ia membentuk realitas sosial melalui praktik akuntansi, pelaporan, dan narasi keberlanjutan. Dalam perspektif *critical accounting*, laporan keberlanjutan berfungsi sebagai teknologi kekuasaan yang mengonstruksi makna tanggung jawab sesuai kepentingan kapital.

Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperkuat pendekatan *critical accounting* dalam mengkaji praktik CSR, dengan mengintegrasikan perspektif interdisipliner seperti ekonomi politik kritis, teori hegemoni, dan teori kekuasaan. Hal ini penting untuk

mengungkap dimensi ideologis, relasi kuasa, serta kepentingan yang tersembunyi di balik praktik dan pelaporan CSR. Selain itu, diperlukan pengembangan kerangka konseptual yang mampu membedakan secara tegas antara CSR yang bersifat simbolik dan yang berorientasi pada transformasi struktural.

DAFTAR PUSTAKA

- Banerjee, S. B. (2008). Corporate social responsibility: The good, the bad and the ugly. *Critical Sociology*, 34(1), 51–79. <https://doi.org/10.1177/0896920507084623>
- Banerjee, S. B. (2011). *Corporate social responsibility: The good, the bad and the ugly*. Edward Elgar Publishing.
- Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power*. Harvard University Press.
- Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. *Business Horizons*, 34(4), 39–48. [https://doi.org/10.1016/0007-6813\(91\)90005-G](https://doi.org/10.1016/0007-6813(91)90005-G)
- Fleming, P., & Jones, M. T. (2013). *The end of corporate social responsibility: Crisis and critique*. SAGE Publications.
- Foucault, M. (1977). *Discipline and punish: The birth of the prison*. Pantheon Books.
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings 1972–1977*. Pantheon Books.
- Friedman, M. (1970, September 13). The social responsibility of business is to increase its profits. *The New York Times Magazine*.
- Friends of the Earth. (n.d.). *Holding Unilever responsible for its conflict palm oil*. Retrieved February 14, 2026, from <https://friendsoftheearth.uk/nature/holding-unilever-responsible-its-conflict-palm-oil>
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks*. International Publishers.
- Habermas, J. (1984). *The theory of communicative action, Vol. 1: Reason and the rationalization of society*. Beacon Press.
- Harvey, D. (2005). *A brief history of neoliberalism*. Oxford University Press.
- Jones, T. M. (1995). Instrumental stakeholder theory: A synthesis of ethics and economics. *Academy of Management Review*, 20(2), 404–437. <https://doi.org/10.5465/amr.1995.9507312924>
- Kompasiana. (2024). *PT Freeport Indonesia: Tantangan dan upaya mengelola isu pencemaran lingkungan di Papua*. Retrieved February 14, 2026, from <https://www.kompasiana.com/putriregitaa/677d18a0c925c40ac9108cc2/pt-freeport-indonesia-tantangan-dan-upaya-mengelola-isu-pencemaran-lingkungan-di-papua>
- Levy, D. L. (2008). Political contestation in global production networks. *Academy of Management Review*, 33(4), 943–963. <https://doi.org/10.5465/amr.2008.34422006>
- Levy, D. L., & Egan, D. (2003). A neo-Gramscian approach to corporate political strategy. *Journal of Management Studies*, 40(4), 803–829. <https://doi.org/10.1111/1467-6486.00356>

- Matten, D., & Moon, J. (2008). “Implicit” and “explicit” CSR: A conceptual framework. *Academy of Management Review*, 33(2), 404–424. <https://doi.org/10.5465/amr.2008.31193458>
- McWilliams, A., & Siegel, D. (2001). Corporate social responsibility: A theory of the firm perspective. *Academy of Management Review*, 26(1), 117–127. <https://doi.org/10.5465/amr.2001.4011987>
- Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2006). Strategy and society: The link between competitive advantage and CSR. *Harvard Business Review*, 84(12), 78–92.
- Reuters. (2025, February 13). *Shell should take responsibility for oil spills, Nigerian community leader says*. Reuters. <https://www.reuters.com/world/africa/shell-should-take-responsibility-oil-spills-nigerian-community-leader-says-2025-02-13/>
- Scherer, A. G., & Palazzo, G. (2011). The new political role of business in a globalized world. *Journal of Management Studies*, 48(4), 899–931. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2010.00950.x>
- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610. <https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080331>
- Utting, P. (2005). Rethinking business regulation: From self-regulation to social control. *United Nations Research Institute for Social Development*.
- Vogel, D. (2005). *The market for virtue: The potential and limits of corporate social responsibility*. Brookings Institution Press.
- Windsor, D. (2006). Corporate social responsibility: Three key approaches. *Journal of Management Studies*, 43(1), 93–114. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2006.00584.x>
- Žižek, S. (2009). *First as tragedy, then as farce*. Verso.